

**PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI MASYARAKAT  
MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA TIYUH GUNUNG KATUN  
TANJUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**DISUSUN OLEH:**

**Dr. Fitri Yanti, MA**

**Yohanes TB**

**Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
2021/ 2022 M**

## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul : Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Lokasi : Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Ketua Tim Pelaksana :  
Nama Lengkap : Dr. Fitri Yanti, MA  
NIP : 197510052005012003  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Anggota Tim Pelaksana  
Jumlah Anggota : 1  
Nama Lengkap : Yohanes TB  
Jabatan : Mahasiswa  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Lembaga/Institusi : BUMDES Tiyuh Gunung Katun  
Penanggung jawab : Adi Kurniawan  
Jabatan : Pengelola Bumdes Gunung Katun  
Alamat : Tulang Bawang  
Jarak PT ke Lokasi : 117 Km  
Mitra/Institusi (Km)
6. Jangka Waktu Kegiatan : 2 Hari

Bandar Lampung, 25 Oktober 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi

Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Pengembangan Masyarakat Islam

  
Dr. Hasan Mukmin, M.Ag

  
Dr. Fitri Yanti, MA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu negara. Pada negara-negara kesejahteraan (welfare state) dan biasanya sudah maju, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan seperti kemiskinan, buruknya kesehatan dan pendidikan, serta krisis kemanusiaan. Pembangunan perekonomian yang juga merupakan hak dari semua masyarakat Indonesia yang diharapkan pada tataran pelaksanaannya lebih dekat kepada masyarakat, dengan sistem pembangunan yang melibatkan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat.

Upaya Pemberdayaan Masyarakat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini juga terkait dengan paradigma baru pemerintahan, yang tidak lagi dominan melaksanakan proses pembangunan namun hanya bersifat katalisator dan fasilitator dalam proses pembangunan. Disamping itu, pada masa lalu pembangunan khususnya di Perdesaan lebih banyak dilaksanakan melalui program-program yang sentralistik serta diterapkan secara seragam bagi Desa-desanya diseluruh Indonesia, dengan mengesampingkan nilai-nilai budaya dan pranata sosial yang berkembang di masyarakat Desa.

Beberapa model program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah memiliki keunggulan yaitu :

1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan kegiatan pembangunan Desa;
2. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi;
3. Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata;
4. Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain;
5. Masyarakat terlibat secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian;
6. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.

Di samping keunggulan-keunggulan diatas, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah juga memiliki berbagai kelemahan seperti :

1. Tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ada dan masih bersifat adhoc;
2. Partisipasi masyarakat maupun pelemagaan masyarakat cenderung bersifat mobilisasi;

3. Keterlibatan pemerintah daerah masih kurang;
4. Ketergantungan terhadap bann teknis dari konsultan masih besar;
5. Keterpaduan program pembangunan sejenis masih bersifat lemah baik dari segi dana, waktu, dan mekanisme pengelolaan

Dari berbagai Program Pemberdayaan yang telah dilakukan cukup berhasil namun ketika program berakhir maka sistem yang telah dibangun bertahun-tahun akan ditinggalkan atau tidak sedikit gerakan pembangunan di desa tidak lagi menggunakan sistem pembangunan yang telah dirintis oleh program pemberdayaan, kecenderungan banyak melupakan, diharapkan semula untuk mendorong dalam penyelarasan pola pembangunan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif, pada dasarnya memiliki dua agenda besar: peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa<sup>1</sup> ini sebuah langkah strategis untuk mempermanenkan sistem atau pola pembangunan yang ada di Desa dan keberadaan Undang-Undang Desa merupakan sesuatu hal yang baru karena bagi desa dengan adanya Undang-Undang Desa yang didampingi oleh Dana diberikan kepada Desa-desanya sebagai dana stimulus dan ini diharapkan akan dapat lebih mempercepat proses pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dan sejahtera, seperti dapat dilihat pada BAB X dalam Undang-Undang Desa, ini berarti bahwa Desa diwajibkan membentuk lembaga keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa ).

BUMDesa merupakan pilar kegiatan Ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas, sehingga melalui lembaga ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat, mengangkat perekonomian masyarakat dan dapat memperkuat pembangunan desa dalam memperoleh keuntungan sehingga ada kontribusi kepada desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat<sup>2</sup>, oleh karena itu semula sebutan Kampung berubah menjadi Tiyuh. Saat ini Tiyuh yang ada di wilayah Kabupaten

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tulang Bawang Barat ini adalah berjumlah 93 tiyuh definitif, terdiri dari 11 tiyuh non transmigrasi dan 82 tiyuh transmigrasi, kemudian ada 7 calon pemekaran tiyuh yang sedang dalam proses.

Pembangunan pada sektor Ekonomi Masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan Tiyuh di Tulang Bawang Barat mengembangkan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT), diharapkan dari lembaga ini dapat membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan mandiri, ini sekaligus upaya dalam Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kegiatan Lembaga Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT), yang ada mengalami dinamika dalam pengelolaan ini terlihat dari data laporan Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) dari total 93 Tiyuh yang memiliki Lembaga Badan Usaha Milik Tiyuh 85 yang aktif dan 8 BUMT yang tidak aktif, kemudian dari jumlah unit usaha yang ada, Aktif : 117 kegiatan, dan Tidak Aktif ; 30 kegiatan. Melihat gambaran persoalan dalam perkembangan kelembagaan ekonomi yaitu pada Badan Usaha Milik Tiyuh dan unit usaha ada kevakuman atau tidak aktif, maka perlu upaya yang lebih konkrit agar dalam proses pengembangan ekonomi melalui lembaga Badan Usaha Milik Tiyuh agar lebih terarah, dengan harapan pemerataan ekonomi lebih cepat dapat tercapai, ini dalam rangka mengantisipasi kesenjangan sosial antar Tiyuh yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Tiyuh-Tiyuh diharapkan oleh seluruh masyarakat Tiyuh mempunyai dampak dalam hal positif pada seluruh sektor, baik dalam peningkatan sumberdaya manusianya (SDM) maupun pemanfaatan Sumber Daya Alamnya dan tidak kalah pentingnya dalam peningkatan ekonomi masyarakat sehingga membuat masyarakat Tiyuh sejahtera dan mandiri. Berdasarkan uraian tersebut mengenai persoalan-persoalan yang ada di 12 Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap pola pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di Tiyuh-Tiyuh, maka perumusan masalah dari Penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengelolaan Dana Tiyuh Pada Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
2. Bagaimanakah peranan kelembagaan Badan Usaha Milik Tiyuh ( BUMT ) dalam Perubahan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat?

## C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melihat pengelolaan Dana Tiyuh Pada Pengembangan dan Perubahan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat serta Peranan Kelembagaan Badan Usaha Milik Tiyuh ( BUMT ) dalam Perubahan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemberdayaan Masyarakat**

##### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.<sup>3</sup>

Secara konseptual pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).<sup>4</sup> Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- c. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan suatu kelompok lemah di masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

##### **2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

---

<sup>3</sup> Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), Hlm. 1

<sup>4</sup> Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, Hlm.57

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Dengan demikian pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang dengan secara swadaya mengelolah sumberdaya apapun yang dapat dikuasainya, dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. Upaya pembangunan ekonomi masyarakat mengarah pada perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

### 3. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Selain itu pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka.<sup>5</sup>

Program-program pengembangan masyarakat secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah. Pengembangan masyarakat secara umum diaktualisasikan dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai langkah penanganan program kemasyarakatan. Program pengembangan masyarakat umumnya menekankan penerapan community-based management (CBM). Yaitu pendekatan pengelolaan program yang menjadikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasarnya. CBM diartikan sebagai suatu strategi untuk mewujudkan praktik pembangunan yang berpusat pada manusia, pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan

---

<sup>5</sup> Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 4

terhadap sumber daya yang dimilikinya. Mereka sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan, aspirasi dan membuat keputusan demi mencapai kesejahteraan yang diimpikan.

Tujuan umum pengembangan masyarakat dapat menentukan proses dan orientasi pengambilan keputusan keberlanjutan kegiatan pengembangan masyarakat. Beberapa tujuan umum dari pengembangan masyarakat yaitu:<sup>6</sup>

1. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
  2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadilan.
  3. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya
  4. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata
  5. Meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota
  6. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
  7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
  8. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara etimologi berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang diartikan kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan sementara Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (KBBI). Dengan demikian, BUMDes merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem pemerintah yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat.

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes.<sup>7</sup>

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes

---

<sup>6</sup> Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2014), hlm. 28-29

<sup>7</sup> Amalia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Journal of Rural and Development* Volume V No. 1 Februari 2014



dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak uas, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Badan usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa Bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desdesa tersebut.

Menurut Herry Kamaroesid Peranan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Membangun dan mengelolah potensi-potensi desa serta mengelola kemampuan ekonomi masyarakat desa, dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d. Membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya sehingga tercapainya suatu kemakmuran bagi masyarakat

#### 5. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku. Pendapatan juga merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghimpunan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, definisi pendapatan merupakan seluruh hasil yang diperoleh atau diterima oleh masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok yang merupakan balas jasa dari faktor-faktor produksi yang dimiliki, seperti berupa gaji, bunga, modal, dan lain sebagainya yang merupakan hasil proses produksi selama jangka waktu tertentu. Tingkat pendapatan rumah tangga tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Jenis kegiatan yang diikutsertakan terdiri dari modal, atau keterampilan.

---

<sup>8</sup> Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2004), hlm. 2

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

A. Persiapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat meliputi :

1. Persiapan administrasi dan koordinasi pengabdian pada masyarakat meliputi

tahapan berikut:

- a. Perekrutan mahasiswa peserta
- b. Penyiapan surat menyurat
- c. Konsultasi dengan Pemerintah Daerah
- d. Koordinasi dengan pemerintah Desa;
- e. Penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa :

Sesi Pembekalan/Coaching :

- Peran mahasiswa dalam Pengabdian Masyarakat;
- Panduan dan pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat;
- Pemahaman tentang Pemerintahan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat;
- Pemahaman Badan Usaha Milik Tiyuh dan Strategi pengembangan Usaha.
- Peraturan dan Regulasi tentang Desa

3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat dilaksanakan pada bulan Oktober dilaksanakan di Tiyuh Gunung Katun Tanjung Kabupaten Tulang Bawang Barat

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta Pengabdian masyarakat adalah melakukan pembinaan dan fasiltasi kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Tiyuh Gunung Katun Tanjung Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Pengembangan Potensi ekonomi oleh Badan Usaha Milik Desa, Selain itu juga dilakukan pembinaan kepada Pengelola BUMT agar lebih memahami proses pemberdayaan masyarakat yang akan digunakan dalam pengembangan usaha dan memberikan pembuinaan kepada masyarakat agar mampu menemu kenali potensi dan masalah di sekitar mereka yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi yang akan dikembangkan secara ekonomi, Metode yang

digunakan dalam melakukan FGD dan pelatihan singkat kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dalam pelaksanaannya dilakukan Focus group discussion untuk melakukan penggalian dan potensi dan masalah yang ada di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kabupaten Tulang Bawang Barat, proses ini bertujuan agar Pemerintah Pekon dan Pengelola BUMT dapat melakukan pemetaan potensi dan masalah yang ada dan mengkaji peluang usaha yang dapat dilakukan sebagai unit usaha BUMT. Pelatihan Singkat diberikan kepada Pengelola BUMT tentang Pengelolaan Usaha, Administrasi keuangan pengelolaan BUMT dan Team Building, hal ini dilakukan agar Pengelola BUMT memahami Administrasi pengelolaan BUMT sehingga bila diperlukan mereka dapat menyajikan data-data secara cepat dan valid, selain itu juga agar pengelola BUMT dapat membuat pelaporan keuangan BUMT sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akan di sampaikan ke Masyarakat secara berkala yang disampaikan secara terbuka dalam sebuah musyawarah hal ini memang standart dilakukan untuk menjaga keterbukaan pengelolaan Bumdes. Materi Team Building di berikan untuk menciptakan kekompakan dan kedisiplinan seluruh Pengelola BUMT agar lebih solid dan melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya sesuai dengan Tupoksi masing-masing.

### C. Rencana Berkelanjutan

Pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mahasiswa selama pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang intensif dan terarah serta tercapai tujuan dari permasalahan yang dialami masyarakat ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi :

1. Penempatan mahasiswa pada berbagai program dalam rangka pemetaan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari berbagai program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan masalah yang dialaminya.
2. Penempatan Masiswa Prodi PMI dalam bentuk Program pemberdayaan masyarakat khususnya memfasilitasi masyarakat yang kurang pemahamannya tentang bagaimana menemukan potensi dan masalah serta bagaimana agar masyarakat mendapatkan penanganan dan Penyelesaiannya.
3. Melibatkan pihak-pihak yang profesional dan kafabel dibidangnya, sehingga keberlanjutan dari program ini tetap ada. Kegiatan ini memberikan wawasan pengetahuan sekaligus pembelajaran kepada mahasiswa tentang bagaimana pelaksanaan Proses pemberdayaan Masyarakat di Desa.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT**

Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMTi) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMTi Gunung Katun Tanjungan juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan terbentuknya BUMTi Gunung Katun Tanjungan seharusnya diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Adapun bentuk peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan yang tidak dapat mewujudkan tujuan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Kurang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi tidak selalu sama. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu mereka memiliki tingkat pola konsumsi yang terbatas dikarenakan pendapatannya harus terbagi-bagi dengan pengeluaran untuk pangan, sedangkan untuk yang berpenghasilan sedang tidak semua masyarakat memiliki tingkat pola konsumsi tinggi ada pula yang rendah. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga disesuaikan dengan kemampuan pendapatan masing-masing masyarakat. Disinilah peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan sangat membantu masyarakat, akan tetapi BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak berperan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat tidak mendapatkan peningkatan kualitas hidup.

Tidak terbantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, di BUMTi Gunung Katun Tanjungan juga tidak mengadakan penyuluhan mengatasi pengelolaan usaha masyarakat untuk meningkatkan usaha tersebut agar mengalami peningkatan dari segi kualitas maupun ekonomi. Dari hasil pengamatan peneliti terhadap masyarakat terlihat bahwa BUMTi Gunung Katun Tanjungan ini tidak berperan terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- b. Kurang memperkuat perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMTi Gunung Katun Tanjungan sebagai pondasinya.

BUMTi Gunung Katun Tanjungan seharusnya hadir untuk memperkuat perekonomian masyarakat, agar masyarakat tidak hanya mengandalkan hasil penjualannya. Akan tetapi masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan peminjaman modal dari BUMTi Gunung Katun Tanjungan.

- c. Tidak berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa

Peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat, Keberadaan BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak membantu masyarakat. kehadiran BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan dalam peminjaman modal dengan pemberian bunga yang telatif rendah dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Tidak hanya itu, aa beberapa masyarakat tetap mengandalkan dirinya untuk bekerja di luar negeri untuk memperoleh penghasilan tambahan untuk keluarganya.

BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak menawarkan peminjaman modal kepada masyarakat guna untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya unit usaha peminjaman modal yang diadakan oleh BUMTi tidak dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha masyarakat, banyak dari masyarakat yang tetap meminjam modal ke Bank, rentenir dengan bunga yang lumayan besar. Peran BUMTi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat, Keberadaan BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak membantu masyarakat. Peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan dirasa masih belum merata, terlihat dari beberapa masyarakat yang masih belum mengetahui unit-unit usaha yang ada di BUMTi Gunung Katun Tanjungan.

Selain itu, salah satu masyarakat merasa keberatan dengan bunga yang diberikan BUMTi Gunung Katun Tanjungan kepada nasabah yang melakukan pinjaman di BUMTi Gunung Katun Tanjungan. Kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai BUMTi Gunung Katun Tanjungan maupun unit-unit usaha yang dimilikinya, cukup memberikan bukti bahwa peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan.

Dengan adanya peminjaman modal pada BUMTi Gunung Katun Tanjungantidak dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, masyarakat tetap meminjam ke Bank dengan proses yang lama dan terbelit-belit. Dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit usaha peminjaman modal di BUMTi Gunung Katun Tanjungan. Dari keterangan-keterangan informan di atas peran yang diberikan BUMTi kurang baik dan belum begitu maksimal dan pemberian bunga yang lumayan tinggi Seperti yang kita ketahui masih banyak masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan yang belum mengetahui adanya unit peminjaman modal.

Keberadaan BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak berperan dengan baik dengan pemberian peminjaman modal kepada masyarakat yang tidak terealisasikan sehingga masyarakat tidak dapat mengembangkan usaha□usahanya. Tidak adanya peningkatan pendapatan masyarakat terjadi karena tidak adanya penambahan modal yang diberikan oleh BUMTi Gunung Katun Tanjungan sehingga masyarakat tidak dapat mengembangkan

usaha-usaha dan keterampilan yang dimilikinya, sehingga usaha-usaha atau ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat terhambat kerana faktor kurangnya suatu modal.

Peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan dilihat dari penyejahteraan masyarakat memperkokoh perekonomian rakyat sebagai kekuatan perekonomian nasional tidak berperan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sumber permodalan yang berasal dari negara untuk rakyat dan dari rakyat untuk negara dan tidak ada investor asing yang masuk dalam kegiatan BUMTi Gunung Katun Tanjungan sehingga tidak ada umpan balik antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Tidak Berusaha Mewujudkan Dan Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Desa. Seharusnya peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa ditunjukkan dengan program pinjaman modal untuk usaha-usaha masyarakat, Dengan tujuan membantu pemerataan ekonomi dan meningkatkan perekonomian yang ada di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. Keberadaan BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak berperan pada aspek perekonomian masyarakat terlihat dari tidak adanya peningkatan jumlah peminjaman dana.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa peran yang diberikan BUMTi Gunung Katun Tanjungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat tidak berperan dan tidak maksimal, terlihat dari tidak adanya peningkatan pendapatan yang dirasakan masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengelolaan BUMTi Gunung Katun Tanjungan dalam meningkatkan pendapatan tidak membantu masyarakat setempat khususnya yang berada di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. Pola perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang ada di BUMTi., adalah dibuat berdasarkan pemikiran masyarakat dan anggota BUMTi Gunung Katun Tanjungan, kemudian disepakati melalui musyawarah desa, dengan begitu rencana-rencana yang disepakati bersama masuk dalam program perencanaan BUMTi Gunung Katun Tanjungan. Akan tetapi tidak semuanya teralisasi sehingga tidak berdampak positif pada keadaan masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. Peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tidak dapat diwujudkan, peranan BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak berhasil diwujudkan dengan adanya unui-unit usaha yang ada didalamnya seperti: unit usaha penyewaan tarup. Tidak terlihat beberapa peningkatan ekonomi masyarakat dikarenakan usaha yang dijalankan oleh BUMTi Gunung Katun Tanjungan. Tidak ada yang berjalan sesuai perencanaan. Hal ini dikarenakan tidak berperannya BUMti Gunung Katun Tanjungan, dalam menjalankan tujuan dan fungsinya.

#### **B. Saran**

1. h BUMTi Gunung Katun Tanjungan agar melakukan kegiartan yang sesuai dengan perenceanaan agar terlaksananya fungsi dan tujuan dari BUMTi. Hal ini mengingat bahwa tidak berjalannya kegiatan BUMTi Gunung Katun Tanjungan yang pada awalnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyatarak Tiyuh Gunung Katun Tanjungan.
2. Kepada masyarakat dan pemerintahan Tiyuh Gunung KatunTanjungan agar melakukan evaluasi terhadap pengurus sekaligus melakukan evaluasi unit usahat yang ada.
3. Kepada Pengurus dan Pemerintah Tiyuh Gunung KatunTanjungan dalam menentukan Unit Usaha melalui kajian kelayakan usaha dan partisipasi masyarakat.
4. Kepada Masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan agar lebih berpartisipasi dalam kegiatan BUMTi Tiyuh Gunung Katun Tanjungan., sehingga keadaan ekonomi masyarakat terus mengalami peningkatan.
5. kepada pembaca dengan hasil pengabdian amsyarakat dan pembahasan tentang Peran Badan Usaha Milik Tiyuh (Bumti) Pada Perubahan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi Pada Tiyuh Gunung Katun Tunjangan) diharapkan dapat terus menemukan inovasi-inovasi dan model-model baru dalam pemberdayaan masyarakat, dengan menyesuaikan keadaan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan berbagai upaya yang dilkukan oleh orang, organisasi, atau instansi yang melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Rosmedi Dan Riza Risyanti, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006),

Edi Sugarto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial,(Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1

Dumasari, Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2014

Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014

Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2004)